

*Arif.
Program
Lec*

**LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN
2020**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASANGKAYU
PROVINSI
SULAWESI BARAT**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASANGKAYU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud dari transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tatakelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sedangkan tujuan dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah menyajikan informasi keuangan yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2020 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 2.795.856.945,- atau mencapai 99,17 % dari anggarannya.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah, SWT, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2020 per tanggal 31 Desember 2020 telah disusun.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai implementasi dari amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan-Peraturan Perundangan lainnya yang menyangkut tentang tanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2009 dan Perubahan kedua Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.

Penyampaian Laporan Keuangan ini disampaikan dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dimana menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2020 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, laporan Neraca yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2020 berkenaan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas di terima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Demikian, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 ini disusun agar dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Pasangkayu pada umumnya.

Pasangkayu, Januari 2021

KEPALA DINAS,



ANDI RAHMAT, S.Sos
NIP. 196111311991011089

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2020 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.652.740.876,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 0, investasi jangka panjang sebesar Rp. 0, aset tetap sebesar Rp. 1.576.328.108,00, dana cadangan Rp. 0 dan aset lainnya sebesar Rp. 76.412.768,00-

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 0,00 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.652.740.876,00 yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 0, ekuitas dana investasi sebesar Rp. 0, dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp. 0.

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua pada pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu;
17. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
18. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasangkayu No 47 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu;
21. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional (LO)
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- d. Neraca; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar mukalaporan keuangan.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Unsur Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Program Pencapaian Target Kinerja

BAB III . IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang **adadalam** Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang ada.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu adalah di bidang aset daerah. Pemerintah daerah melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan bagi Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Umum serta Pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu mempunyai 7 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- d. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan;
- e. Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah;
- e. Program Pemeliharaan Kantoran dan Pencegahan Tindak Kriminal;
- f. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan ;
- g. Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat;

belum adanya gudang penyimpanan persediaan ATK dan penyimpanan Barang Milik Negara, serta banyaknya peralatan perkantoran yang rusak.

4. Koordinasi dan sinkronisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan instansi-instansi yang ada baik di dalam dan di luar daerah belum optimal.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan sebesar **Rp.2.819.383.746,00**-yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasi	2.753.775.146,00
2	Belanja Modal	65.608.600,00
JUMLAH		2.819.383.746,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Pasangkayu selama tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Pendapatan			
	- Pendapatan Asli Daerah	0	0	0.00
2	Belanja			
	- Belanja Operasi	2.753.775.146,00	2.740,798,345.00	99.53
	- Belanja Modal	65.608.600,00	55.058,600.00	83,92
JUMLAH		2.819.383.746,00	2.740.798.345,00	99.53

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan akan kinerja dan penganggaran yang masih belum dilakukan secara baik, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) pada dokumen anggaran (DPPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah aparatur dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang memadai,

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 47 Tahun 2020

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas dan sebaliknya bila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan adanya penyajian kembali untuk pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Penerapan basis akrual pertama kalinya, juga menghasilkan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1. Pendapatan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah daerah.

b. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali.

2. Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

4. Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

6. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatandan Belanja

a. Pendapatan

Realisasi Pos Anggaran Pendapatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020,

b. Belanja

Belanja pada umumnya meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam Tahun Anggaran 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu terdapat beberapa belanja yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

Alokasi anggaran tahun 2020 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu sebesar **Rp.2.819.383.746,00** yang terbagi kedalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pada Belanja Tidak Langsung terdapat anggaran sebesar **Rp. 2.218.421.296,00** dan pada Belanja Langsung sebesar **Rp. 600.962.450,00** Pertanggal 31 Desember 2020, anggaran tersebut telah terealisasi sebesar **Rp. 586.259.950,00**-atau sebesar **99,17%** dari total anggaran yang ada.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2020 sebagai berikut:

1. BelanjaOperasi

Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2020 sebesar **Rp.2.795.856.945,00,-**dengan rincian sebagai berikut:

No	BelanjaOperasi	Anggaran2020 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2020	2019
1	2	3	4	5
1	BelanjaPegawai	2.218.421.296,00	2,209,596,995.00	2.147.764.361,00
2	BelanjaSubsidi			
3	BelanjaBarang dan Jasa	535.353.850,00	531,201,350.00	877.170.646,00
	Jumlah	2.819.383.746,00	2.795.856.945,00	3.024.935.007.00

2. Belanja Modal

Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu meliputi Belanja Kendaraan, Peralatan, Perlengkapan, Komputer, Meubelair dan Alat-alat lainnya dengan realisasi tahun 2020 **Rp.55.058.600,00**. Rincian belanja modal tersebut, sebagai berikut:

No	Belanja Modal	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2020	2018
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	,000.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,608,600.00	48.770.000,00	48.770.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0
4	Belanja Modal Jalan Irogasi dan Jaringan	40,000,000.00	29,450,000.00	
Jumlah		65.608.600,00	55.058.600,00	48.770.000,00

5.2. Penjelasan Laporan Operasional

a. Pendapatan-LO

Realisasi Pos Anggaran Pendapatan-LO pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020, senilai **Rp.0.00**,

b. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Selama Tahun 2020 Beban pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu adalah sebesar **Rp. 2,845,734,240.00** dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar **Rp. 3,055,341,714.00**, atau (6,86%.)

Beban Operasi

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 2,209,596,995.00**, apabila dibandingkan beban pegawai pada Tahun 2019 yaitu sebesar **Rp. 2,147,764,361.00** atau 2,88%

2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 72,473,150.00**, apabila dibandingkan pada tahun 2019 **Rp. 130,278,900.00** atau (44,37 %)

3. Beban Jasa

Beban Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 71,257,000.00**, apabila dibandingkan pada tahun 2019 **Rp. 222,664,586.00** atau (68,00 %)

4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 33,560,000.00** apabila dibandingkan pada tahun 2019 **Rp. 49,289,860.00** atau (31,91%)

5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 353,911,200.00**, apabila dibandingkan pada tahun 2019 **Rp. 474,937,300.00** atau (25,48%)

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 104,935,895.00**, apabila dibandingkan pada tahun 2019 **Rp. 30,406,707.00** atau 245,11%

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 254,120,293.00**

-.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. (2,845,734,240.00)**, yang dihasilkan dari transaksi menukupan Surplus/Defisit-LO.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2020. Koreksi-koreksi tersebut bernilai **Rp. 0,00**.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
		2020
1	2	3
1	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:	
1	Koreksi Nilai Persediaan	0.00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00
3	Koreksi ekuitas lainnya	0.00
4	Mutasi Aset Tetap	0.00
4	Koreksi terhadap utang	0.00
6	Kewajiban untuk di konsolidasikan	2,795,856,945.00

4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Badan Kesatuan Bangsa dan

7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Lain- lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkaya pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 0.00, apabila dibandingkan pada tahun 2018 Rp. 0.00 atau 0,00%

8. Beban Lain-lain

Beban Lain- lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 0.00, apabila dibandingkan pada tahun 2019 Rp. 0.00 atau 0,00%

Rincian Beban, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)		Kenaikan/ Penurunan	%
		2020	2019		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN – LO	0.00	0.00	0.00	(0.00)
2	BEBAN	2,845,734,240.00	3.055,341,741.00	(209,607,474.00)	6.86
1	BEBAN OPERASI				
	Beban Pegawai– LO	2,209,596,995.00	2.147,764,361.00	61,832,634.00	2.88
	Beban Persediaan	72,473,150.00	130,278,900.00	(57,805,750.00)	(44.37)
	Beban Jasa	71,257,000.00	222,664,586.00	(151,407,586.00)	(68.00)
	Beban Pemeliharaan	33,560,000.00	49,289,860.00	(15,729,860.00)	(31.91)
	Beban Perjalanan Dinas	353,911,200.00	474,937,300.00	(121,026,100.00)	(25.48)
	Beban Penyusutan Amortisasi	104,935,895.00	30,406,707.00	74,529,188.00	245.11
	Beban Penyisihan Piutang				
	Beban Lain-lain				
	Jumlah	(2,845,734,240.00)	(3.055,341,741.00)	(209,607,474.00)	(6.86)

9. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020, berdasarkan realisasi pendapatan yang nihil atau Rp. 0,00 dan realisasi beban Rp. 2,845,734,240.00, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu mengalami Defisit sebesar Rp. (2,845,734,240.00). Defisit ini terjadi karena adanya Pendapatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020.

5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. **1.652.740.876,00** dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2019 sebesar Rp. **254.120.293,00**.

5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

a. Aset

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Aset Lancar	0.00	0.00
2	Investasi Jangka Panjang	0.00	0.00
3	Aset Tetap	1,576,328,108.00	177,707,525,00
4	Dana Cadangan	0.00	0.00
5	Aset Lainnya	76.412.768.00	76.412.768.00
Jumlah		1,652,740,876.00	254,120,293,00

1. Aset Lancar

Aset Lancar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0.00
3	Kas di BLUD	0.00	0.00
4	Kas Lainnya	0.00	0.00
5	Setara Kas	0.00	0.00
6	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
7	Piutang Pendapatan	0.00	0.00
8	Piutang Lainnya	0.00	0.00
9	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
10	Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
11	Persediaan	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan

PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp.0,00**.

Kas di BendaharaPengeluaran

Saldo Kas di BendaharaPengeluaran pada Badan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp.0,00**.

Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD pada Badan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp.0,00**.

Kas Lainnya

Saldo Kas lainnya pada Badan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp.0,00**.

Setara Kas

Saldo pada setara Kas Badan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp.0,00**.

InvestasiJangkaPendek

Saldo pada InvestasiJangkaPendekBadan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp. 0,00**.

PiutangPendapatan

SaldoPiutangPendapatan pada Badan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp.0,00**.

PiutangLainnya

SaldoPiutanglainnya pada Badan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp.0,00**.

PenyisihanPiutang

SaldoPenyisihanPiutang pada Badan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp.(0.00)**.

Beban DibayarDimuka

Saldo Beban yang dibayardimuka pada Badan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp.0,00**.

Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2020, sebesar **Rp.0,00**

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Pendek pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

3. Aset Tetap

Aset Tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Tanah	0.00	0.00
2	Peralatan dan Mesin	513,653,451.00	484,410,563.00
3	Gedung dan Bangunan	1,410,976,002.00	0.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	81,627,000.00	0.00
5	Aset Tetap lainnya	0.00	0.00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00	0.00
7	Akumulasi Penyusutan	(429,928,345.00)	(306.703.038.00)

Jumlah	1,652,740,876.00	177,707.525,00
---------------	-------------------------	-----------------------

Tanah

Saldo Tanah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 513,653,451.00**.

Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 1,410,976,002.00**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 81,627,000,00**.

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. (429.928.345.00)**.

4. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Dana Cadangan	0.00	0.00

Jumlah	0.00	0.00
---------------	-------------	-------------

5. AsetLainnya

AsetLainnya pada Badan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayutahun2020, adalahsebagaiberikut:

No	Uraian	Tahun2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	TagihanJangka Panjang	0.00	0.00
2	KemitraandenganPihakKetiga	0.00	0.00
3	AsettidakBerwujud	0.00	0.00
4	Aset lain-lain	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

TagihanJangka Panjang

SaldoTagihanJangka Panjang Badan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp. 0,00**.

KemitraandenganPihakKetiga

Saldo pada KemitraandenganPihakKetigaBadan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp. 0,00**.

AsettidakBerwujud

SaldoAsettidakBerwujudBadan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp. 0,00**.

Aset Lain-Lain

SaldoAset Lain-Lain pada Badan KesatuanBangsa dan PolitikKabupatenPasangkayu per 31 Desember2020sebesar**Rp.0,00**

b. Kewajiban

No	Uraian	Tahun2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	KewajibanJangkaPendek	0.00	0.00
2	KewajibanJangka Panjang	0.00	0.00

Jumlah	0.00	0.00
---------------	-------------	-------------

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
2	Utang Bunga	0.00	0.00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
5	Utang Beban	0.00	0.00
6	Utang Jangka Pendek lainnya	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Utang Bunga

Saldo Utang Bunga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai saldo pada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Utang Beban

Saldo Utang Beban pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020, sebesar **Rp.0,00**.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Utang Dalam Negeri	0.00	0.00
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

Utang Dalam Negeri

Saldo Utang Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

c. Ekuitas

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Ekuitas	1.652,740,876,00	254,120,293,00
Jumlah		1.652,740,876,00	254,120,293,00

Ekuitas

Nilai saldo pada Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.1.652,740,876,00** sedangkan Tahun 2019 sebesar **Rp.254,120,293,00,-**

BAB IV

PENUTUP

Pada akhir Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 ini, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan berkenaan dengan Laporan Keuangan SKPD tiap akhir tahun anggaran. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020, telah disusun dengan berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Realisasi Anggaran Tahun 2020 pada anggaran Belanja Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 dengan penyerapan anggaran sebesar **99,17%** dan telah sesuai dengan target yang diharapkan.
3. Kas pada Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020, adalah **Rp. 0,00**.
4. Neraca SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020, menggambarkan posisi keuangan yakni posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Per 31 Desember 2020, pada Pos Aset Tetap telah dilakukan perhitungan nilai penyusutan Aset yang ada.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini disusun berdasarkan penggunaan anggaran Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020

Demikian Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu yang di buat dan dilaporkan per 31 Desember 2020. Laporan ini disampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu.

Diharapkan, Laporan Keuangan ini dapat menjadi bahan acuan semesta pihak dalam penilaian kinerja instansi pemerintah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu yang merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan yang diamanatkan dalam tata kelola Good Governance.

Sekian dan Terima Kasih.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

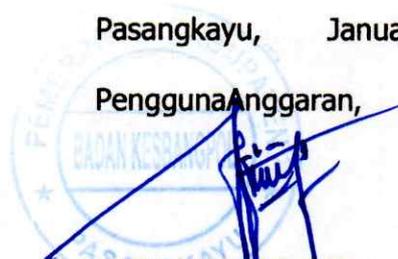
Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah di susun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian pernyataan ini kami buat dan untuk dipergunakan seperlunya.

Pasangkayu, Januari 2021

Pengguna Anggaran,



ANDI RAHMAT, S.Sos

NIP. 196111311991011089

NERACA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	513.653.451,00	484.410.563,00
Gedung dan Bangunan	1.410.976.002,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	81.627.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-429.928.345,00	-306.703.038,00
JUMLAH ASET TETAP	1.576.328.108,00	177.707.525,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	76.412.768,00	76.412.768,00
JUMLAH ASET LAINNYA	76.412.768,00	76.412.768,00
JUMLAH ASET	1.652.740.876,00	254.120.293,00

NERACA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
R/K Pusat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	1.652.740.876,00	254.120.293,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.652.740.876,00	254.120.293,00

Pasangkayu, 31 Januari 2021
 Pengguna Anggaran

ANDI RAHMAT, S.Sos.
 NIP. 196112311986031089

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No. Urut	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	2.845.734.240,00	3.055.341.714,00	-209.607.474,00	-6,86
9.1.1	Beban Pegawai - LO	2.209.596.995,00	2.147.764.361,00	61.832.634,00	2,88
9.1.2	Beban Persediaan	72.473.150,00	130.278.900,00	-57.805.750,00	-44,37
9.1.2	Beban Jasa	71.257.000,00	222.664.586,00	-151.407.586,00	-68,00
9.1.2	Beban Pemeliharaan	33.560.000,00	49.289.860,00	-15.729.860,00	-31,91
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	353.911.200,00	474.937.300,00	-121.026.100,00	-25,48
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	104.935.895,00	30.406.707,00	74.529.188,00	245,11
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9.1.10	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.11	Beban Bagi Hasil - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-2.845.734.240,00	-3.055.341.714,00	209.607.474,00	-6,86
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-2.845.734.240,00	-3.055.341.714,00	209.607.474,00	-6,86
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-2.845.734.240,00	-3.055.341.714,00	209.607.474,00	-6,86

Pasangkayu, 31 Januari 2021
 Pengguna Anggaran

ANDI RAHMAT, S.Sos.
 NIP. 196112311986031089

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
5	BELANJA	2.819.383.746,00	2.795.856.945,00	99,17	3.073.705.007,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.753.775.146,00	2.740.798.345,00	99,53	3.024.935.007,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.218.421.296,00	2.209.596.995,00	99,60	2.147.764.361,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	535.353.850,00	531.201.350,00	99,22	877.170.646,00
5.2	BELANJA MODAL	65.608.600,00	55.058.600,00	83,92	48.770.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.608.600,00	25.608.600,00	100,00	48.770.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.000.000,00	29.450.000,00	73,63	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-2.819.383.746,00	-2.795.856.945,00	99,17	-3.073.705.007,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-2.819.383.746,00	-2.795.856.945,00	99,17	-3.073.705.007,00

Pasangkayu, 31 Januari 2021
 Pengguna Anggaran

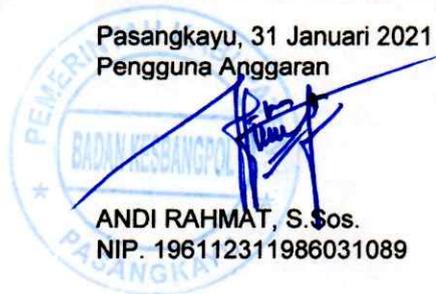


ANDI RAHMAT, S.Sos.
 NIP. 196112311986031089

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	254.120.293,00	235.757.000,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	-2.845.734.240,00	-3.055.341.714,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Mutasi Aset Tetap	1.448.497.878,00	0,00
Koreksi Terhadap Utang	0,00	0,00
Koreksi Perubahan Kebijakan Akuntansi	0,00	0,00
Koreksi Saldo Penyisihan Piutang Pihak Ketiga (Temp)	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.795.856.945,00	3.073.705.007,00
EKUITAS AKHIR	1.652.740.876,00	254.120.293,00

Pasangkayu, 31 Januari 2021
 Pengguna Anggaran



ANDI RAHMAT, S.Sos.
 NIP. 196112311986031089